

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat ternyata berdampak pada perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di dunia. Akibatnya kondisi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah terpantau di wilayah lain. Selain itu, berkembangnya globalisasi juga menyebabkan semakin kaburnya batas-batas kenegaraan dan meningkatkan interaksi masyarakat internasional melampaui batas-batas kedaulatan negara. Proposisi ini ternyata juga berlaku bagi kasus perkembangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Keberadaan TKI Indonesia di luar negeri ternyata tidak lepas dari berbagai persoalan yang terjadi di dalam negeri, antara lain kemiskinan dan keterbelakangan dan belum tercapainya pemerataan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah-daerah di Indonesia, sehingga kondisi ini mendorong bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi TKI sebagai upaya untuk merubah nasib dan masa depan secara lebih baik. Di lain pihak, negara-negara tujuan, antara lain di beberapa negara di jazirah Arab, Asia Timur ataupun Malaysia dan Singapura begitu

membutuhkan jasa TKI. Inilah yang menjadi titik temu TKI, keterbelakangan dan ketersediaan lapangan dan upah yang lebih memadai di luar negeri.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2012 jumlah penduduk negara ini mencapai 241 juta jiwa yang menjadikannya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia keempat, setelah Republik Rakyat Cina (RRC), India dan Amerika Serikat. Di balik besarnya jumlah penduduk, Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan sosial, antara lain adalah keterbelakangan dan kemiskinan bagi sebagian penduduknya, khususnya yang tinggal di wilayah rural (wilayah non-perkotaan).<sup>2</sup>

Munculnya berbagai persoalan sosial di Indonesia kemudian menjadi faktor pendorong (*push factor*) bagi sebagian kelompok masyarakat untuk berinisiatif dalam mencari peruntungan dan mata pencaharian yang layak sebagai TKI. Jika dilihat dari faktor sejarah, perkembangan TKI di Indonesia berawal pada tahun 1890-an, pada saat mobilisasi masyarakat Indonesia sekitar 95 orang yang terdiri dari kelompok dewasa dan anak-anak dari wilayah pulau Jawa untuk bekerja di Suriname, sebuah negara kecil koloni Belanda di wilayah Amerika Selatan. Inilah yang menjadi tonggak sejarah bagi sejarah TKI pertama kalinya di Indonesia.<sup>3</sup>

Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah kolonial Belanda menjadi semakin sering mengirimkan sekelompok masyarakat Indonesia ke Suriname,

---

<sup>1</sup> Fredi Rakuti, "Mengkali Sistem Perlindungan TKI", *Kompas*, 8 November 2010.

<sup>2</sup> Koenandi Kartasmita, *60 Tahun Indonesia Merdeka*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal.21.

<sup>3</sup> "Dilema TKI : Antara Tuntutan dan Harapan", *Kompas*, 23 Juni 2010.

Guyana dan beberapa negara jajahan lainnya, bukan hanya dari wilayah Jawa, namun juga masyarakat di wilayah Sumatera ataupun Kalimantan. Kemudian pengiriman sebagian masyarakat Indonesia ke luar negeri juga diselenggarakan oleh pemerintah Belanda karena adanya bencana alam antara lain Gunung Merapi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 1925-an, Gunung Galunggung di Jawa Barat dan bencana alam lainnya. Disinilah terjadi hubungan yang saling menguntungkan (*mutual relationship*) antara masyarakat Indonesia dengan pihak kolonialis Belanda.<sup>4</sup>

Perkembangan TKI moderen di Indonesia terjadi pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947 saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia. Kemudian di tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mulai mengirimkan TKI ke dua negara yaitu Arab Saudi dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki persamaan agama dan pemerintah kedua negara ini secara resmi mengajukan ke pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengirimkan sebagian masyarakat terlatih sebagai pekerja luar negeri.<sup>5</sup>

Seiring dengan berkembangnya waktu dinamika TKI berkembang semakin pesat. Terlebih lagi di tahun 1998 Indonesia dihadapkan pada krisis moneter yang menyebabkan tingginya angka inflasi dan peningkatan angka kemiskinan di

---

<sup>4</sup> "Sejarah Penempatan TKI Dari Masa ke Masa", dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/14/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke-masa-403483.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Indonesia. Inilah yang menyebabkan perkembangan TKI terus meningkat dari tahun ke tahun.

Seiring dengan berkembangnya waktu perkembangan TKI menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2009-2013 negara-negara yang menjadi tujuan utama TKI, yaitu Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darusallam, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Sejak tahun 1980-an, TKI memang memiliki peranan penting bagi dinamika sosial-ekonomi negara-negara tujuan. Inilah yang menyebabkan tingginya permintaan (*demand factor*) TKI ke negara-negara tersebut karena jika dilihat dari faktor keterampilan, faktor upah dan lain-lainnya TKI memiliki banyak keunggulan dibandingkan tenaga kerja dari negara lainnya, misalnya India, Pakistan, Vietnam ataupun Thailand.<sup>6</sup>

Dari tahun 2010 hingga 2012 jumlah TKI ternyata menunjukkan tren peningkatan. Jumlah ini jika ditinjau dari faktor jenis kelamin ternyata lebih di dominasi kaum laki-laki, dibandingkan perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari faktor usia hampir sebagian besar TKI tersebut berusia produktif, yaitu sekitar 22 hingga 40 tahun dan sebagian lainnya berusia lebih muda atau lebih tua yang sebagian besar berasal dari jalur ilegal.<sup>7</sup>

Pada periode tahun 2006 hingga 2012 rata-rata jumlah TKI keluar negeri rata-rata berada di atas angka 750 ribu orang. Di tahun 2006 secara spesifik jumlah total

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> "Tenaga Kerja Indonesia : Berdasarkan Pada Jumlah", Badan Pusat Statistik, dalam [http://www.bps.go.id/brs\\_file/naker\\_07mei12.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07mei12.pdf), diakses pada tanggal 13 Januari 2014.

TKI mencapai 680.000 orang, kemudian di tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 696.746 orang, di tahun 2008 sebesar 644.731 orang, tahun 2009 sebesar 632.172 orang, tahun 2010 sebesar 575.803 orang dan tahun 2012 sebesar 888.081 orang. Dari angka tersebut maka pada tahun 2007 hingga 2012 jumlah TKI terus menunjukkan tren peningkatan, kasus penurunan hanya terjadi pada tahun 2010.<sup>8</sup>

Dinamika TKI di luar negeri ternyata tidak lepas dari berbagai persoalan. Beberapa diantaranya, yaitu kekerasan, intimidasi, perlakuan tidak manusiawi, pendeportasian paksa, hingga tidak terpenuhinya hak-hak para pekerja tersebut. Negara-negara yang menjadi seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan TKI tersebut adalah Malaysia dan Arab Saudi.

Beberapa kasus terkemuka tentang kekerasan dan pelanggaran hak-hak TKI antara lain terjadi pada kasus Kokom binti Bama, yang merupakan TKI yang berasal dari wilayah Jawa Barat yang bekerja di jedah Arab Saudi. Pada akhir tahun 2013, Kokom mengalami penyiksaan dimana tubuhnya mengalami luka-luka serius dan gaji selama beberapa bulan juga tidak dibayarkan.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat kasus lainnya yaitu Tursini binti Satorip Usup yang merupakan TKI asal Indramayu yang disekap oleh majikannya di Singapura pada September 2012.<sup>10</sup> Kasus-kasus ini menjadi bukti

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> "Penyiksaan TKI Kokom di Arab Saudi Sulit Diproses", dalam [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/01/140127\\_tki\\_arab\\_saudi.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/01/140127_tki_arab_saudi.shtml), diakses pada tanggal 19 Februari 2014.

<sup>10</sup> "Tursini 18 Bulan Disekap Majikan di Singapura", dalam <http://buruhmigran.or.id/2013/09/23/tursini-18-bulan-disekap-majikan-di-singapura/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2014.

bahwa keberadaan TKI sangat rawan terhadap aksi kekerasan dan pelanggaran hak-haknya sebagai pekerja.

Dalam rangka menangani berbagai persoalan mengenai TKI, pemerintah Indonesia pada tahun 2004 berhasil membentuk institusi khusus yang dinamakan dengan BNP2TKI, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Kemudian dalam memperkuat kinerja BNP2TKI, dikeluarkanlah regulasi baru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006. Pembentukan BNP2TKI ternyata tidak hanya melibatkan entitas-entitas ketenagakerjaan saja, namun juga Kementerian Luar Negeri, kementerian Tenaga Kerja, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan Kementerian Imigrasi.<sup>11</sup>

Keberadaan BNP2TKI memiliki peranan penting bagi dinamika ketenagakerjaan luar negeri Indonesia. Insitusi ini tidak hanya berorientasi dalam membangun kerbagai kebijakan dan upaya dalam konteks domestik, namun juga kebijakan-kebijakan luar negeri, baik yang diorientasikan kepada sektor-sektor swasta asing ataupun dengan aktor-aktor pemerintah (*Government to Government / G to G*) negara-negara dunia. Selain itu, keberadaan BNP2TKI sebagai institusi formal juga memiliki struktur organisasi yang sistematis karena memiliki level sub-organisasi

---

<sup>11</sup> "Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI", dalam <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2014.

dibawahnya yang lengkap, dari deputi, biro, direktorat hingga pusat penelitian dan pengembangan.<sup>12</sup>

### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk peran yang dijalankan oleh BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan kepada TKI tahun 2009-2013 ?”

### **C. Kerangka Teori**

Dalam upaya menjawab pokok permasalahan dan kemudian menarik hipotesa maka penulis menggunakan pendekatan yang relevan, yaitu teori peran. Pendekatan ini dipilih karena memiliki relevansi dan keterkaitan dalam menjawab berbagai peran/kiprah BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan kepada TKI tahun 2009-2013.

Teori peran merupakan teori yang menitik beratkan pada peran organisasi atau negara dalam menangani suatu peristiwa yang memerlukan kajian dan tindakan yang sistemis. Teori peran (*role theory*) adalah sebuah teori yang menitik beratkan pada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

sebuah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh orang atau organisasi yang menduduki posisi penting.<sup>13</sup>

Seseorang atau lembaga yang memiliki jabatan atau posisi tersebut diharapkan mampu memainkan atau menjalankan peranannya di dalam posisi atau jabatan yang dipegangnya. Setiap organisasi yang menduduki suatu posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.<sup>14</sup> Purwo Santoso dan Joash Tapiheru mengutarakan secara rinci mengenai pemikiran kritis mengenai kebijakan publik dari komprehensivitas dan kecanggihan analisis hingga evaluasi kebijakan. Purwo Santoso lebih jauh menganggap bahwa implementasi kebijakan publik akan dapat lebih mudah dimaknai sebagai proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis, dengan mendayagunakan serangkaian instrumen untuk menghasilkan perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Penulis sendiri menganggap bahwa implementasi kebijakan publik bukan hanya sekedar proses untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis, namun lebih dari itu, perlu sebuah pendekatan secara non-tekstual dari pembuat kebijakan untuk merumuskan hingga mengimplementasikan kebijakan publik dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.<sup>15</sup>

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam

---

<sup>13</sup> Fred Charles Ikle, "How Nations Negotiate" dikutip dalam R.P Barston, *Modern Diplomacy*, Longman, London and New York, 1989, hal.76-77

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Purwo Santoso dan Joash Tapiheru, *Analisis Kebijakan Publik : Modul Pembelajaran*, Research Center for Politics and Government, Yogyakarta, 2010, hal.126.

pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.<sup>16</sup> Definisi lainnya menyebutkan bahwa kebijakan adalah "*sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat kebijakan itu sendiri dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut*".<sup>17</sup>

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*.<sup>18</sup> Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya.

Kebijakan merupakan hal yang melekat dari peran organisasi formal. Menurut Mohtar Mas'ood, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik, yaitu : "*...aktor politik pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Dalam hal ini aktor*

---

<sup>16</sup> BN. Marbun, *Kamus Politik Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal.265.

<sup>17</sup> Catherin Athlaus and Peter Davis et, al, *The Australian Policy Handbook : Edisi Keempat*, Allen and Unwin Press, Sydney, 2007, hal.2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

*politik diartikan sebagai individu atau kelompok yang kegiatan politik dari individu itu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya.*"<sup>19</sup>

Kemudian peran institusi formal tersebut di dukung dengan konsep *management resource* institusi formal. Menurut Purwo Santoso pada kondisi berkembang negara kebijakan bukan semata-mata ditujukan sebagai regulasi (payung hukum) bagi kinerja aparatur, namun juga media bagi pendekatan antara elit, pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada masyarakat merupakan bagian dari tanggung-jawab pemerintah sebagai bantuk tanggung jawab sosial, sekaligus tanggung-jawab politik.<sup>20</sup>

Kebijakan insititusi formal dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada era globalisasi tidak semata-mata hanya berkaitan dengan aspek domestik/dalam negeri saja, namun juga berkaitan dengan manajemen atau tata kelola kerjasama luar negeri/ Ini disebabkan pada beberapa persoalan yang terjadi melibatkan berbagai isu dan entitas-entitas internasional. sehingga apa yang ditempuh insititusi formal tentunya tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kerjasama dan hubungan luar negeri yang efektif.<sup>21</sup>

Kemudian menurut David Easton peran organisasi/institusi formal ternyata berkaitan dengan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan dalam konteks domestik dan kebijakan dalam konteks internasional. David Easton menyatakan bahwa :

---

<sup>19</sup> Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional*, PAU-SS Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal.44.

<sup>20</sup> Puwo Santoso, *Birokrasi di Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.23-24.

<sup>21</sup> *Ibid.*

*“...dikotomi penyelesaian masalah dibalik kebijakan dalam negeri dan luar negeri semakin tidak akan menjadi dikotomi politik. Dinamika globalisasi yang semakin kompleks menyebabkan sulitnya pembedaan kebijakan dalam dan luar negeri. Kesemuanya harus dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan persoalan transnasional itu sendiri.”<sup>22</sup>*

Kemudian bentuk-bentuk peran dari organisasi/institusi formal secara umum dapat dibedakan menjadi enam bentuk, masing-masing yaitu :<sup>23</sup>

- a. Membangun kesepakatan dan kerjasama dengan entitas-entitas dalam dan luar negeri, meliputi pemerintah, kelompok kepentingan, masyarakat ataupun aktor-aktor swasta.
- b. Menyebarluaskan informasi kepada khalayak, baik melingkupi khalayak dalam negeri, luar negeri ataupun kedua-duanya untuk memperoleh dukungan dan legitimasi secara luas.
- c. Memberikan layanan secara langsung dengan memantau dan menengahi (mediasi) persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
- d. Menjalankan peran lanjutan dengan memberikan dukungan lebih lanjut antara lain pendampingan hukum (advokasi) ataupun mengirimkan tenaga ahli advokasi ke dalam dan luar negeri.

---

<sup>22</sup> David Easton, “The Foreign Policy in New Millenoum Age” dalam William de Coplin and John e Carroll, *International Politic : From Cold War to Millenium Disorder*, Penguin Book, London-New York, 2004, hal.32=-33.

<sup>23</sup> *Ibid.*39.

- e. Membangun evaluasi atau menyelesaikan persoalan dalam forum yang lebih tinggi secara politis.
- f. Menghentikan secara total penyelesaian persoalan-persoalan dengan membubarkan aktor-aktor yang ada di dalam sistem untuk kemudian membangun sistem baru yang lebih fleksibel dan efektif.

Dari ke enam proposisi yang dikemukakan oleh David Easton ternyata bersifat relatif. Subyektif. Dengan kata lain, terkadang aktor formal hanya menerapkan satu, dua, mengkombinasikan diantaranya ataupun dapat juga menerapkan kesemuanya. Dengan kata lain penerapan keenam proposisi tersebut sangat bergantung pada dinamika yang terjadi. Jika dikaitkan dengan kasus peran BNP2TKI dalam mendukung perlindungan kepada para TKI maka ketentuan yang relevan adalah insemiinasi informasi, advokasi, mediasi dan kerjasama internasional.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada TKI melalui BNP2TKI ternyata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan dalam konteks dalam negeri (domestik) dan kebijakan dalam konteks internasional (kerjasama luar negeri). Dengan demikian maka dapat difahami bahwa proposisi (teori) yang dikemukakan oleh David Easton tersebut bersifat relatif, dimana negara dapat menjalankan satu atau dua atau dapat semua peran yang ada kemudian didukung dengan kebijakan eksternal seperti yang dikemukakan Purwo Santoso yang dalam hal ini kerjasama internasional yang efektif.

Berdasarkan pada paparan pendekatan/teori di atas maka dapat diaplikasikan bahwa peran yang dijalankan oleh BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan kepada TKI tahun 2009-2013 ternyata tidak lepas dari aspek seting organisasi. Dengan kata lain, BNP2TKI merupakan bagian dari struktur birokrasi di Indonesia yang memiliki otoritas secara khusus tentang perlindungan TKI. Fakta ini kemudian menjadikan BNP2TKI menjadi aktor yang bertanggung-jawab dalam membangun berbagai upaya terkait dengan perlindungan TKI.

Kemudian jika dikaitkan dengan langkah-langkah yang dijalankan oleh BNP2TKI maka berbagai langkah yang dijalankan oleh institusi ini ternyata relevan dengan pendekatan peran organisasi yang dikemukakan oleh David Easton. Fungsi publikasi yang dijalankan oleh BNP2TKI dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik untuk mengkampanyekan tentang pelayanan dan perlindungan kepada TKI. Sebagai contoh tentang hal ini pada tahun 2006 BNP2TKI telah membangun kerjasama dengan dua surat kabar nasional dan berbagai media daerah untuk iklanisasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur upah/gaji mahal sebagai TKI. Institusi ini juga bekerjasama dengan stasiun televisi nasional dan radio-radio yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, BNP2TKI juga menjalankan fungsi advokasi yang dijalankan oleh BNP2TKI dengan membangun perundang-undangan dan regulasi, serta bantuan hukum dalam pelayanan dan perlindungan kepada TKI. Hal ini dapat dilihat dari penerapan berbagai peraturan pemerintah, baik

undang-undang, peraturan setingkat menteri atau bentuk-bentuk regulasi lainnya untuk diaplikasikan dalam perlindungan TKI.

Kemudian BNP2TKI juga menjalankan fungsi mediasi yang dijalankan oleh BNP2TKI melalui pendampingan dalam memperjuangkan pada level nasional dan internasional dalam mewujudkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI. Bukti mengenai hal ini adalah pendampingan pada kasus penganiyaaan TKI Indonesia di luar negeri. Selain itu, BNP2TKI juga menerapkan fungsi dukungan kerjasama luar negeri yang dijalankan oleh BNP2TKI dengan membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

#### **D. Hipotesa**

Dengan merunut permasalahan yang telah dikemukakan serta berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut bahwa peran yang dijalankan oleh BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan kepada TKI tahun 2009-2013 diwujudkan melalui :

- a. Fungsi publikasi yang dijalankan oleh BNP2TKI dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik untuk mengkampanyekan tentang pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

- b. Fungsi advokasi yang dijalankan oleh BNP2TKI dengan membangun perundang-undangan dan regulasi, serta bantuan hukum dalam pelayanan dan perlindungan kepada TKI.
- c. Fungsi mediasi yang dijalankan oleh BNP2TKI melalui pendampingan dalam memperjuangkan pada level nasional dan internasional dalam mewujudkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI.
- d. Fungsi dukungan kerjasama luar negeri yang dijalankan oleh BNP2TKI dengan membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan sifat data yang sekunder yaitu metode kualitatif yaitu sebuah metode analisa data-data yang sifatnya non-angka, data-data ini berupa pernyataan, berita, laporan. Jika terdapat tabel, skema dan diagram yang sifatnya kuantitatif, hal ini hanya untuk memperkuat deskripsi analisa saja, dan bukan merupakan hasil akhir.<sup>24</sup> Sementara teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sutrisno Hadi, studi kepustakaan adalah sumber kepustakaan

---

<sup>24</sup> Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

yang penting karena didalamnya terdapat kondensasi (kumpulan) dari sebagian terbesar penyelidikan yang pernah dilakukan orang.<sup>25</sup>

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data sekunder, yang artinya dalam penulisan ini penulis tidak menjalankan observasi (penelitian) langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, yang diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui :

1. Buku-buku
2. Surat Kabar dan Majalah
3. Jurnal Sosial Politik dan Artikel
4. Internet (*Web Site*).

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 57.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2009 hingga 2013. Dipilih tahun 2009-2013 mengindikasikan berbagai peran yang dijalankan oleh institusi ini untuk mengimplemtasikan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan kerelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

### **H. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang peran yang dijalankan oleh BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan kepada TKI tahun 2009-2013.
2. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang profil BNP2TKI dan dinamika ketenagakerjaan luar negeri Indonesia, mencakup aspek visi-misi, struktur organisasi dan berbagai regulasi operasionalnya.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang gambaran dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh TKI, khususnya pada periode 2009-2013. Pembahasan meliputi persoalan tentang kekerasan, pelanggaran hak pekerja, pelecehan seksual dan beberapa problematika lainnya.

BAB IV membahas tentang pembuktian hipotesa yaitu peran yang dijalankan oleh BNP2TKI dalam program pelayanan dan perlindungan kepada TKI tahun 2009-2013 melalui fungsi publikasi, advokasi, mediasi dan dukungan kerjasama luar negeri.

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya